

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis OPD, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang.

Dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Batang merupakan kontribusi bagi Dinas Perhubungan untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Batang.

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sesuai dengan amanat regulasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

I.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batang 2017 – 2022 merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang 2017 – 2022.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 Tahun kedepan serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sektor perhubungan. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten Batang menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Batang adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perhubungan diharapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah terutama di sektor perhubungan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Batang.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Batang tahun 2017-2022 yaitu terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Pelayanan

Pada bab ini digambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya yang ada pada OPD; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan renstra pada lembaga berkaitan baik pusat maupun provinsi; telaahan RTRW dan KLHS; penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dijabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini digambarkan mengenai strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan OPD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan

Pada bagian ini dikemukakan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

II.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2016 Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana dalam membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaran upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- e. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- f. penyelenggaraan manajemen transportasi;
- g. pengelolaan manajemen perparkiran;
- h. pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- i. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- j. pengendalian teknis di bidang perhubungan;
- k. penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- l. penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- m. penyelenggaraan kesekretariatan Dishub;
- n. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan;
- o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang. Tugas dan fungsi sekretariat serta bidang sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaiaan dan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Dishub;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan bidang angkutan darat, keterminalan, angkutan laut, dan kepelabuhanan serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang angkutan;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang angkutan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan darat dan keterminalan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. pelaksanaan rekomendasi teknis di bidang angkutan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Angkutan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang keselamatan dan teknik sarana;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang keselamatan dan teknik sarana;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang;
- f. pelaksanaan rekomendasi teknis dibidang keselamatan dan teknik sarana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian, pengawasan lalu lintas dan perparkiran. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Lalu Lintas;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan lalu lintas, dan perparkiran;
- e. pelaksanaan rekomendasi teknis di Bidang Lalu Lintas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Lalu Lintas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

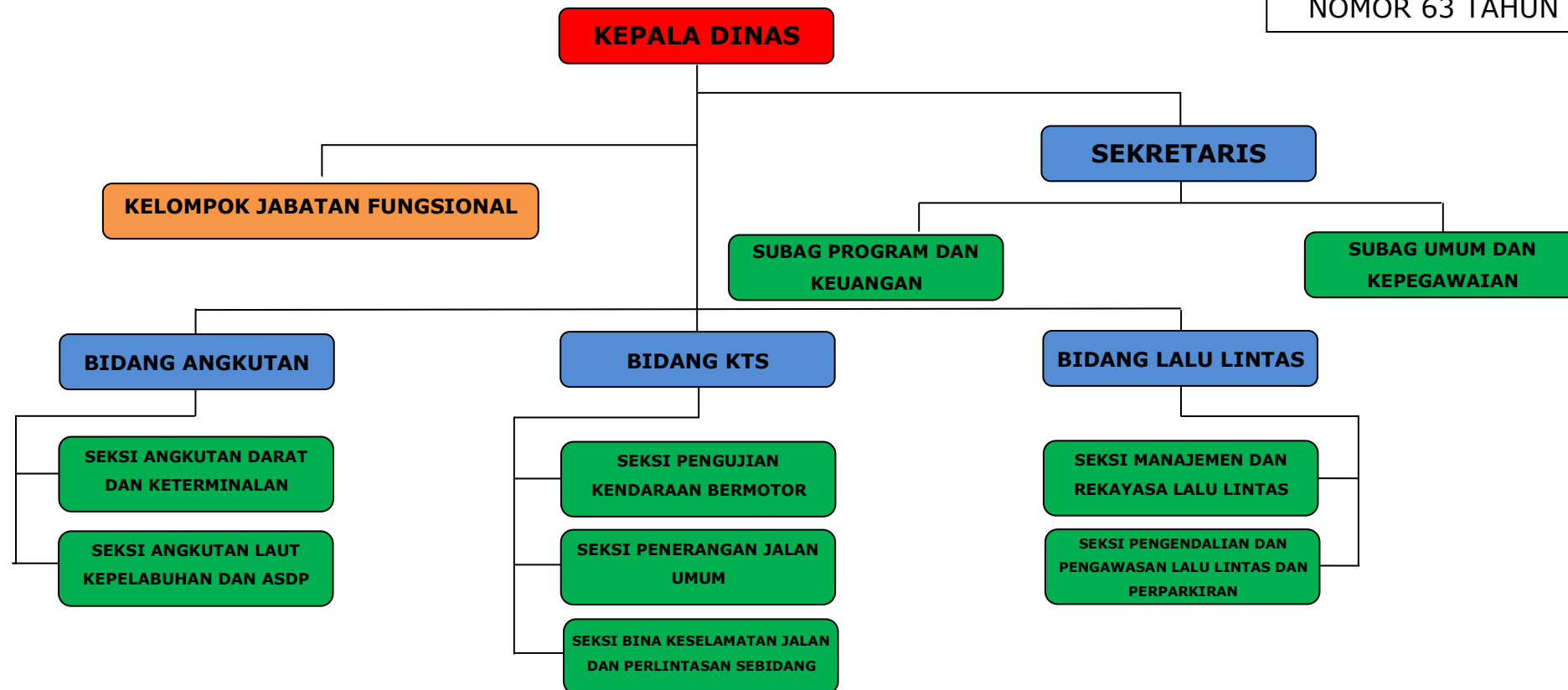
II.1.2. Struktur Organisasi

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan; dan
 - 2) Seksi Angkutan Laut, Kepelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3) Seksi Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang.
- e. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG

BERDASARKAN PERBUP
NOMOR 63 TAHUN 2016



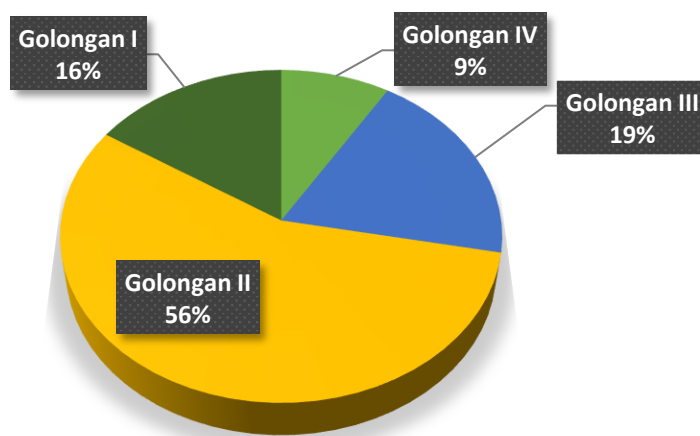
II.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan / karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017 berjumlah 57 orang dengan perincian sebagai berikut:

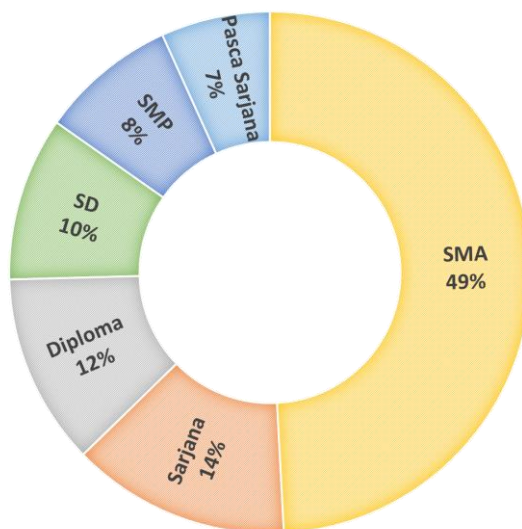
1. Menurut golongan

- | | | | |
|----|--------------|---|----------|
| a. | Golongan IV | : | 5 orang |
| b. | Golongan III | : | 11 orang |
| c. | Golongan II | : | 32 orang |
| d. | Golongan I | : | 9 orang |



2. Menurut Pendidikan

- | | | | |
|----|---------------|---|----------|
| a. | Pasca Sarjana | : | 4 orang |
| b. | Sarjana | : | 8 orang |
| c. | Diploma | : | 7 orang |
| d. | SMA | : | 29 orang |
| e. | SMP | : | 5 orang |
| f. | SD | : | 6 orang |



3. Menurut Eselon

- a. Eselon II : 1 orang
- b. Eselon III : 4 orang
- c. Eselon IV : 9 orang
- d. Staf : 43 orang

Jumlah karyawan / karyawan Non PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017 berjumlah 15 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Menurut Pendidikan

- a. Sarjana : 3 orang
- b. Diploma : -
- c. SMA : 3 orang
- d. SMP : 3 orang
- e. SD : 6 orang

Jumlah karyawan / karyawan kontrak di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017 berjumlah 77 orang.

Rekapitulasi jumlah pegawai dinas perhubungan Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL 2.1
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

NO	BAGIAN/BIDANG	Gol. IV				JML	Gol. III				JML	Gol. II				JML	Gol. I				JML	JUMLAH PNS	GENDER		HONORER			JML	JUMLAH
		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d			L	P	PP31	THL	Kontrak		
1	SEKRETARIAT	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	6	3	9	-	-	-	-	-	12	11	1	2	-	13	15	27
2	BIDANG ANGKUTAN	1	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	1	10	-	12	-	1	7	-	8	25	25	-	1	-	3	4	29
3	BIDANG KTS	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	1	3	1	6	-	1	-	-	1	11	11	-	2	-	59	61	72
4	BIDANG LALU LINTAS	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	-	5	-	-	-	-	-	8	7	1	2	-	2	4	12
	JUMLAH	3	1	-	-	4	1	2	2	6	11	3	4	21	4	32	-	2	7	-	9	56	54	2	7	-	77	84	140

II.2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Sarana

➤ Tanah dan Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Gedung kantor Dinas Perhubungan	5.890 m ²
2.	Bangunan Terminal Bandar	600 m ²
3.	Bangunan Terminal Banyuputih	18.430 m ²
4.	Bangunan Pangkalan Penundan	12.500 m ²
5.	Bangunan Terminal Bawang	3.780 m ²
6.	Bangunan Terminal Limpung	6.440 m ²

➤ Kendaraan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda 4	6 unit
2.	Truk crane	1 unit
3.	Truk + attachment	1 unit
4.	Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain	1 unit
5.	Sepeda motor	34 unit

b. Prasarana

➤ Peralatan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Alat bengkel dan alat ukur	53 unit
2.	Alat kantor dan rumah tangga	479 unit
3.	Alat studio dan alat komunikasi	54 unit

➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan dan jembatan
2. Bangunan air / irigasi
3. Instalasi listrik
4. Jaringan Listrik

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Keberhasilan pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat dari indikator kinerja utama berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan capaian indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 4 tahun (mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016), dapat dikatakan bahwa untuk indikator kinerja Dinas Perhubungan rata-rata berhasil tercapai. Akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum dapat tercapai yang harus mendapat perhatian. Adapun kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 2.2
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2012 - 2017 (PERIODE 2012 s/d 2016)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. BATANG

No.	Urusan/Indikator	Satuan	Sumber	Realisasi Capaian Kinerja Renstra 2012 - 2017									
				2012		2013		2014		2015		2016	
				target	realisasi	Target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/Unit	RPJMD	n/a	0,0052	n/a	0,0046	n/a	0,0036	n/a	0,0029	n/a	0,0029
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	Permendagri 54 Th 2010	15.057.360	10.362.869	14.917.680	10.132.251	10.298.734	10.022.000	10.103.542	10.022.000	10.100.310	9.827.325
3	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	Permendagri 54 Th 2010	n/a	664.677	n/a	679.534	690.980	689.850	689.850	650.000	650.250	648.338
4	Rasio ijin trayek	Persentase	Permendagri 54 Th 2010	65	62	65	60	60	66	60	65	59	60
5	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit/kali	Permendagri 54 Th 2010	610	612	610	614	616	535	618	535	620	539
6	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis												
	1. Pelabuhan												
	A. Pelabuhan Laut	Unit	Permendagri 54 Th 2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	B. Pelabuhan Lokal	Unit	Permendagri 54 Th 2010	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	2. Terminal												
	A. Type B	Unit	Permendagri 54 Th 2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	B. Type C	Unit	Permendagri 54 Th 2010	8	9	8	9	10	10	10	10	10	10

No.	Urusan/Indikator	Satuan	Sumber	Realisasi Capaian Kinerja Renstra 2012 - 2017									
				2012		2013		2014		2015		2016	
				target	realisasi	Target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
7	Angkutan darat	Persentase	Permendagri 54 Th 2010	74	72	74	70	66	62	66	60	61	60
8	Kepemilikan KIR angkutan umum	Unit	Permendagri 54 Th 2010	622	622	622	622	612	535	611	535	609	539
9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	Permendagri 54 Th 2010	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rupiah	Permendagri 54 Th 2010	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Pencapaian indikator-indikator tersebut tidak lepas dari anggaran yang tersedia pada Dinas Perhubungan dan pengelolaannya. Dalam prosesnya penyerapan anggaran tersebut berbanding lurus dengan pencapaian indikator kinerja utama. Itu berarti penganggaran di Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Jika dilihat dari kinerja anggaran, capaian kinerja Dinas Perhubungan termasuk kategori tinggi yaitu pada kisaran 80 – 90%. Dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2012 - 2016

Uraian	2012			2013			2014			2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	7.842.833.398	7.016.406.229	89,46	11.267.687.450	8.679.128.636	77,03	10.603.837.030	9.272.787.776	87,45	9.994.405.744	8.891.384.886	88,96	9.877.610.207	9.041.569.019	91,54
Belanja Tidak Langsung	3.471.641.959	3.445.940.399	99,25	3.589.089.827	3.483.092.568	97,05	3.994.234.919	3.936.181.006	98,55	4.367.582.997	4.227.097.814	96,78	4.278.145.771	4.109.267.351	96,05
Total	11.314.641.959	10.462.346.628	92,47	14.856.777.277	12.162.221.204	81,86	14.598.071.949	13.197.844.182	90,41	14.361.988.741	13.118.482.700	91,34	14.155.755.978	13.150.836.370	92,90

Selain melaksanakan tugas pelayanan wajib dibidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang juga mengampu pendapatan. Pendapatan yang dikelola Dinas Perhubungan berasal dari retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi izin trayek dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Capaian kinerja pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.4
REALISASI PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2012 - 2016

Uraian	2012			2013			2014			2015			2016		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pendapatan	662.754.000	761.423.200	114,89	709.112.000	839.015.500	118,32	906.018.000	1.497.026.234	165,23	1.350.000.000	1.330.349.720	98,54	1.050.099.800	1.534.470.100	146,13

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan juga populasi kendaraan Kabupaten Batang yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi terkait keselamatan, kelancaran serta kenyamanan dan keamanan transportasi. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, peluang ini sudah ditangkap dengan pemasangan sarana prasarana pendukung keselamatan seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu penerangan jalan dan juga guardrail serta pelaksanaan sosialisasi mengenai keselamatan lalu lintas. Untuk kelancaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batang berusaha untuk meningkatkan fungsi dari angkutan dengan penyediaan sarana penunjang angkutan umum agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga jumlah kendaraan yang melintas berkurang. Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan terkait system penunjang kenyamanan dan keamanan kendaraan dengan uji petik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUSI OPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

1. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengemudi, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.
2. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
3. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Batang seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan banyak yang rusak karena kecelakaan.
4. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
5. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Batang, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
6. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
7. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
8. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi prioritas bagi pemangku kebijakan.

9. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi / orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional.
10. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang

Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Batang.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Batang yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tentram dan Sejahtera pada tahun 2022”.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Bupati terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Batang.

Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang merupakan organisasi perangkat daerah teknis dibidang Perhubungan mendukung pembangunan daerah yang telah dicanangkan dalam visi dan misi Bupati tersebut. Dalam pencapaian visi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Batang diberi tugas untuk melaksanakan tujuan pada misi 3 yaitu :

Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah Kabupaten Batang. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, dan berkeselamatan.

III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

- Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan

Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

- a. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi :
 - i. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi;
 - ii. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi;

- iii. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;
 - iv. Peningkatan / pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan;
 - v. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - vi. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan;
 - vii. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
 - viii. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;
 - ix. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;
 - x. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.
- b. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain :
- i. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
 - ii. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi;
 - iii. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang;
 - iv. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good

governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

➤ Telaah Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- i. Mewujudkan Struktur Kelembagaan yang efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi
- ii. Mewujudkan Sarana Prasarana yang Menunjang kinerja
- iii. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki Kompetensi sesuai bidangnya.

2. Misi Kedua :

Meningkatkan pelayanan perhubungan dan aksesibilitas yang handal, aman, nyaman, terjangkau, ramah lingkungan, kompetitif serta berkelanjutan dengan tujuan Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Transportasi

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatnya Ketersediaan dan Kondisi moda serta keselamatan transportasi
- ii. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat
- iii. Mengendalikan polusi emisi gas buang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor

3. Misi Ketiga :

Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi

III.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Secara geografis, wilayah Kabupaten Batang meliputi wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Hal itu berpengaruh pada pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dimana daerah dataran tinggi yang sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit dan bertebing serta beberapa ruas rawan longsor membuat pembangunan jalan, jembatan dan jaringan irigasi di daerah tersebut harus benar-benar memperhatikan faktor alam sehingga konstruksi jalan, jembatan serta jaringan irigasi yang dibangun bisa tahan lama.

Sedangkan di wilayah dataran rendah, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kondisi wilayah yang kadang tergenang air yang disebabkan drainase yang mampet ataupun luapan air dari sungai.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Tingkat kemacetan yang perlu penanganan secara intens dari potensi kemacetan dari kota / kabupaten tetangga serta pusat keramaian.
2. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian.

3. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
4. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.
5. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Batang disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
6. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi.
7. Penataan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

Terselenggaranya kualitas transportasi yang aman dan berkeselamatan guna menunjang kelancaran dan ketertiban mobilitas masyarakat

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan lancar.
2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase zona / wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan lancar	a. Persentase angkutan umum yang laik jalan	17%	20%	22%	24%	25%
				b. Persentase menurunnya tingkat pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	51%	52%	53%	53%	53,5%
				c. Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dijalan protokol pada jam sibuk	1,5%	1,5%	1,75%	1,75%	2%
					30 km /jam	28 km /jam	26 km /jam	24 km /jam	22 km /jam

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				d. Rasio panjang jalan	2	2	2	2	2
				e. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan	70%	70%	75%	75%	80%
			Meningkatnya keselamatan lalu lintas	a. Persentase penurunan angka kecelakaan	2%	2%	2,5%	3%	3%

IV.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dari penjabaran Misi ke 3 RPJMD untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional sesuai dengan penjabaran misi ke 3 RPJMD. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, yaitu :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022, yaitu :

“Terwujudnya pemerintahan yang harmonis, energik, berdaya saing, agamis, tentram dan sejahtera pada tahun 2022”

2. Tujuan

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yaitu :

- a. Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
- b. Terselenggaranya kualitas transportasi yang aman dan berkeselamatan guna menunjang kelancaran dan ketertiban mobilitas masyarakat

3. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang baik.
- b. Mewujudkan Sarana Prasarana yang Menunjang kinerja.
- c. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki Kompetensi sesuai bidangnya.

- d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan lancar
- e. Meningkatnya keselamatan lalu lintas.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG

V.1. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
2. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang / pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
3. Memberikan sosialisasi kepada pengusaha angkutan, operator dan personel angkutan mengenai peraturan yang ada agar tercipta angkutan yang berkeselamatan.
4. Mengirimkan aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Batang untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor.

V.2. Kebijakan

Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah menetapkan kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada pelanggaran lalu lintas.
2. Penerapan analisa dampak lalu lintas di setiap pembangunan kawasan.
3. Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas seperti (ATCS).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya. Penetapan Indikator capaian kinerja pada kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang selama 5 tahun ke depan dapat dilihat dari Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaaan Indikatif selama 5 tahun mendatang. Adapun tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaaan Indikatif adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan lancar	Persentase angkutan umum yang laik jalan				51%		51%		52%		53%		53%		53,5%			
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Batang		50%		51%		52%		53%		53%		53,5%		Dinas Perhubungan	

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji		-	-	2 unit	600	2 unit	750	1 unit	800	1 unit	850	1 unit	850	Dinas Perhubungan	
			Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji		9.000 unit / tahun	412	9.000 unit / tahun	412	9.300 unit / tahun	560	9.400 unit / tahun	600	9.420 unit / tahun	650	9.430 unit / tahun	650	Dinas Perhubungan	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen		1 kali	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	80	1 dokumen	100	1 dokumen	120	Dinas Perhubungan	
			Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Kapal	Jumlah dokumen		-	-	1 dokumen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	
		Persentase menurunnya tingkat pelanggaran				-		1,5%		1,5%		1,75%		1,75%		2%			

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM 05 Batang 51261 Jawa Tengah – Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		laik jalan kendaraan orang dan barang																		
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah korban jiwa)		2%		4%		4,5%		5%		5,5%		6%		Dinas Perhubungan		
			Kegiatan penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah sopir yang dibina		1 kali	100	75 orang	100	100 orang	200	125 orang	250	150 orang	300	150 orang	300	Dinas Perhubungan		

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah penegakan peraturan dan pengamanan lalu lintas		1 kali	351,5	125 kali	351,5	150 kali	460	150 kali	500	150 kali	510	200 kali	550	Dinas Perhubungan		
		Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada jam sibuk				30 km /jam		30 km /jam		28 km /jam		26 km /jam		24 km /jam		22 km /jam				
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah korban jiwa)		2%		4%		4,5%		5%		5,5%		6%		Dinas Perhubungan		

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM 05 Batang 51261 Jawa Tengah – Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah penegakan peraturan dan pengamanan lalu lintas		1 kali	351,5	125 kali	351,5	150 kali	460	150 kali	500	150 kali	510	200 kali	550	Dinas Perhubungan	
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah kendaraan yang terlibat kejadian)		1%		2%		2%		2,5%		3%		3%		Dinas Perhubungan	
			Penyelenggara-an analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	Jumlah dokumen yang dianalisa		1 kegiatan	130	14 dokumen	130	15 dokumen	150	20 dokumen	200	20 dokumen	250	15 dokumen	150	Dinas Perhubungan	

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Rasio panjang jalan				2		2		2		2		2		2				
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah korban jiwa)		2%		4%		4,5%		5%		5,5%		6%		Dinas Perhubungan		
			Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah penegakan peraturan dan pengamanan lalu lintas		1 kali	351,5	125 kali	351,5	150 kali	460	150 kali	500	150 kali	510	200 kali	550	Dinas Perhubungan		
			Program pengendalian dan pengamanan	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah		1%		2%		2%		2,5%		3%		3%		Dinas Perhubungan		

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			lalu lintas kendaraan yang terlibat kejadian)																	
			Penyelenggara-an analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	Jumlah dokumen yang dianalisa		1 kegiatan	130	14 dokumen	130	15 dokumen	150	20 dokumen	200	20 dokumen	250	15 dokumen	150	Dinas Perhubungan		
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan						75%		75%		80%		80%		85%				
			Program Pembangunan Prasarana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap		60%		60%		65%		70%		75%		80%		Dinas Perhubungan		

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dan Fasilitas Perhubungan	pelayanan transportasi															
			Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah dokumen regulasi / aturan-aturan bidang perhubungan		1 dokumen	150	1 dokumen	150	1 dokumen	180	1 dokumen	200	1 dokumen	250	1 dokumen	250	Dinas Perhubungan	
			Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan	Jumlah dioperator kapal yang tersosialisasi / tersertifikasi		1 kali	120	75 orang	120	100 orang	250	200 orang	300	250 orang	350	300 orang	400	Dinas Perhubungan	
			Peningkatan pengelolaan terminal angkutan	Jumlah dermaga dan fasilitas		1 paket	400	1 unit	400	1 unit	500	1 unit	550	1 unit	600	1 unit	600	Dinas Perhubungan	

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			sungai, danau dan penyeberangan	penyeberangan dan wisata																
			Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah terminal type C yang sesuai standar		1 paket	565	1 terminal	565	1 terminal	580	1 terminal	620	1 terminal	605	1 terminal	600	Dinas Perhubungan		
			Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tingkat cakupan pelayanan perhubungan		50%		50%		55%		60%		65%		70%	50%	Dinas Perhubungan		
			Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah terminal yang dibangun di wilayah		5 unit	350	1 terminal	350	1 terminal	450	1 terminal	500	1 terminal	500	1 terminal	500	Dinas Perhubungan		

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Kabupaten Batang																
				Jumlah halte yang dibangun di wilayah Kabupaten Batang		-		5 unit		5 unit		7 unit		-		-			Dinas Perhubungan	
			Pembangunan Pelabuhan dan Akses Jalan	Panjang jalan yang dibangun beserta fasilitas pendukung		1 paket	7.324,2	500 m	7.324,2	300 m	5.315	700 m	7.000	600 m	5.000	400 m	2.500	Dinas Perhubungan		
				Volume reklamasi pantai								180x69,5x-1,5 m3						Dinas Perhubungan		

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Optimalisasi Pengembangan Pelabuhan Lokal	Jumlah pelabuhan lokal yang dikembangkan		1 kegiatan	1.500	1 unit	1.500	1 unit	1.600	1 unit	1.650	1 unit	1.650	1 unit	1.700	Dinas Perhubungan		
	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan						2%		2%		2,5%		3%		3%				
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah lintaskendaraan)			1%	2%		2%		2,5%		3%		3%		Dinas Perhubungan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				yang terlibat kejadian)																
			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu yang terpasang		1 paket	550	75 unit	550	73 unit	650	108 unit	750	1 unit	600	1 unit	600	Dinas Perhubungan		
			Pengadaan marka jalan	Volume marka yang dipasang		1 paket	250	729 m2	250	729 m2	250	750 m2	300	750 m2	300	750 m2	300	Dinas Perhubungan		
			Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah guardrail terpasang		1 paket	1.000	450 m	1.000	400 m	1.000	400 m	1.100	410 m	1.200	400 m	1.200	Dinas Perhubungan		
			Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang		1 paket	150	40 unit	150	72 unit	200	80 unit	250	393 unit	350	620 unit	350	Dinas Perhubungan		

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	Jumlah dokumen yang dianalisa		1 kegiatan	130	14 dokumen	130	15 dokumen	150	20 dokumen	200	20 dokumen	250	15 dokumen	150	Dinas Perhubungan	
			Pembangunan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Utama (Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur)	Jumlah lampu PJU yang terpasang		1 paket	4.500	450 titik	4.500	530 titik	5.000	690 titik	6.000	730 titik	6.500	690 titik	6.000	Dinas Perhubungan	
			Pengadaan dan pemasangan peringatan dini perlintasan sebidang (PDPS)	Jumlah pos palang perlintasan yang dibangun		-	-	-	-	3 lokasi	650	3 lokasi	650	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Penurunan tingkat kecelakaan fatal (jumlah korban jiwa)		2%		4%		4,5%		5%		5,5%		6%		Dinas Perhubungan	
			Kegiatan penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah sopir yang dibina		1 kali	100	75 orang	100	100 orang	200	125 orang	250	150 orang	300	150 orang	300	Dinas Perhubungan	
			Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan	Jumlah penegakan peraturan dan pengamanan lalu lintas		1 kali	351,5	125 kali	351,5	150 kali	460	150 kali	500	150 kali	510	200 kali	550	Dinas Perhubungan	

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			umum dijalan raya																	
			Pengumpulan dan analisis data base database pelayanan angkutan angkutan umum	Jumlah dokumen database angkutan umum		1 kegiatan	125	1 dokumen	125	1 dokumen	150	1 dokumen	200	1 dokumen	250	1 dokumen	300	Dinas Perhubungan		
			Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi		1 kali	250	250 orang	250	280 orang	400	300 orang	420	325 orang	450	350 orang	450	Dinas Perhubungan		
			Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak	Jumlah peserta lomba AKUT perwakilan awak		1 kali	200	100 orang	200	100 orang	300	150 orang	350	150 orang	400	150 orang	400	Dinas Perhubungan		
						2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		Dinas Perhubungan		

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM 05 Batang 51261 Jawa Tengah - Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			kendaraan angkutan umum teladan	angkutan untuk mewakili lomba tingkat propinsi																
			Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah peserta lomba PPKJ Jumlah rapat dalam setahun		2 kegiatan	150	50 orang	150	2 kegiatan	200	2 kegiatan	250	2 kegiatan	300	2 kegiatan	350	Dinas Perhubungan		
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah titik parkir yang diawasi		1 kali	50	200 titik	50	230 titik	100	250 titik	150	275 titik	200	300 titik	250	Dinas Perhubungan		
			Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek	Jumlah dokumen jaringan trayek		1 kali	200	1 dokumen	200	1 dokumen	300	1 dokumen	350	1 dokumen	400	1 dokumen	400	Dinas Perhubungan		

Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Jalan Raya Kandeman KM 05 Batang 51261 Jawa Tengah – Telp/Fax. (0285) 391387

Email : dishub@batangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Angkutan Pedesaan																	
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana dalam kondisi baik		50%		50%		55%		60%		65%		70%		Dinas Perhubungan		
			Rehabilitasi / pemeliharaan terminal pelabuhan	Jumlah terminal yang dipelihara		1 paket	700	9 terminal	700	9 terminal	900	9 terminal	900	9 terminal	650	9 terminal	750	9 terminal	Dinas Perhubungan	
			Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara		1 paket	350	80 unit	350	80 unit	400	85 unit	450	90 unit	510	85 unit	500	85 unit	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan	Jumlah PJU yang dipelihara		1 paket	1.000	500 titik	1.000	500 titik	1.100	550 titik	1.200	570 titik	1.300	570 titik	1.400	Dinas Perhubungan	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlintasan Sebidang	Jumlah perlintasan sebidang yang dikendalikan Dishub Batang		10 titik	1.400	10 titik	1.400	10 titik	1.500	12 titik	1.650	12 titik	1.700	12 titik	1.750	Dinas Perhubungan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yang mendukung capaian indicator sasaran RPJMD 2017-2022, yaitu :

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan lancar	a Persentase angkutan umum yang laik jalan	Jumlah kendaraan lulus uji / Jumlah KBWU x 100%
		b Persentase menurunnya tingkat pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	Jumlah pelanggaran tahun sekarang-Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya / Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya x 100%
		c Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada jam sibuk	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan = Σ kecepatan rata-rata/n
		d Rasio panjang jalan	Jumlah panjang jalan / Jumlah kendaraan x 100%
		e Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	Jumlah penumpang puas / jumlah total penumpang x 100%
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	Jumlah kecelakaan tahun sekarang-Jumlah kecelakaan tahun sebelumnya / Jumlah kecelakaan tahun sebelumnya x 100%

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode tahun 2017–2022 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran perangkat daerah periode tahun 2017–2022. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Selengkapnya, Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut:

TABEL 7.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan	Stn	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Misi 3: Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.													
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)			Indeks	64,00	65,00	66,00	66,50	67,00	68,00	69,00	69,00
			Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase zona / wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi		%	NA	15	17	20	22	24	25	25

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagai acuan bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam menyusun, merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan dibidang perhubungan periode tahun 2017-2022.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perhubungan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

Batang, 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATANG,

Drs. MURDIYONO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620727 198607 1 001